



**RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS SOSIAL
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
2025**



JL. HARAPAN BARU BLOK, C No. 28

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan kinerja dan penganggaran Perangkat Daerah untuk tahun 2025, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2025 mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Oleh karena itu Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2025 dapat dikerjakan dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Dinas Sosial, evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Sosial tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Dinas Sosial Tahun 2024-2026.

Mengamati pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ke tahun, peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis telah berjalan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan. Pada Rencana Kerja tahun 2025 disamping mengoptimalkan program dan kegiatan yang telah berjalan juga dirumuskan program kegiatan baru untuk mempersiapkan kesinambungannya.

Tersusunnya Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2025 ini, disamping sebagai dokumen rencana kerja, juga diharapkan dapat dijadikan bahan acuan dalam penyusunan rencana kegiatan tahunan sehingga terdapat arah yang jelas dari program/kegiatan Dinas Sosial sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam bidang sosial. Melalui Rencana Kerja ini pula diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja.

Pangkajene Sidenreng, 22 Juli 2024
Kepala Dinas Sosial,

WAHIDAH ALWI, SP., MM

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19710315 199803 2 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI..... ii

DAFTAR TABEL..... iii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 2

1.3. Maksud dan Tujuan 4

1.4. Sistematika Penulisan 5

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 6

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 6

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 12

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 13

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 14

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat..... 20

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS SOSIAL 21

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 21

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 21

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 23

4.1 Program dan Kegiatan 23

BAB V PENUTUP 28

DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD .. 8

Tabel T-C.30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial 12

Tabel TPB/SDGs Tahun 2024 13

Tabel T-C.31 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024..... 15

Tabel T-C.32 Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2025..... 20

Tabel Program dan Kegiatan 23

Tabel T-C.33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan PD Tahun 2024 25

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 merupakan dokumen yang akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta sebagai tolok ukur pencapaian kinerja dalam kurun waktu satu tahun. Penyusunan Renja 2025 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 Dinas Sosial menjabarkan arah pembangunan dalam sektor yang mengacu pada RPD 2025-2026. Rencana Kerja SKPD ini disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun-tahun sebelumnya, antisipasi terhadap permasalahan yang dihadapi dengan memperhatikan aspirasi stakeholder dan dinamika perkembangan lingkungan strategis. Hal tersebut merupakan pilihan yang telah menjadi komitmen bersama, sehingga dalam pencapaiannya harus dilakukan secara bersama-sama antara Pemerintah Daerah, DPRD, kelompok-kelompok masyarakat yang bergerak di bidang sosial budaya, ekonomi, politik dan keamanan. Untuk mencapai hal tersebut proses pembangunan daerah harus dilaksanakan dengan sistematis mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.

Dari pemikiran di atas, perencanaan pembangunan baik dilihat dari sisi manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan adalah merupakan instrumen pembangunan yang sangat penting tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Dengan kata lain perencanaan pembangunan yang baik akan dapat menghasilkan pembangunan yang baik pula yang dapat memberikan manfaat serta dampak yang jauh lebih besar.

Proses penyusunan Rencana Kerja didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan Renja SKPD juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, hal ini sejalan dengan Pasal 2 (dua) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa Daerah Kabupaten dan Kota merupakan bagian dari Provinsi serta mempunyai hubungan wewenang, keuangan, Pelayanan umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya lainnya. Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan

RKPD dan Renja SKPD, yang menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan SKPD serta masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang.

1.2 Landasan Hukum

Adapun Landasan Hukum Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 17).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) 2025 Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 105

adalah sebagai Pedoman perumusan penyempurnaan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 Perangkat Daerah;

Sedangkan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial adalah :

1. Sebagai pedoman bagi penyusunan program dan kegiatan yang diusulkan serta merupakan jabaran dari Renstra agar penyelenggaraan dan pelaksanaannya berjalan efektif, efisien, tepat sasaran dan sinkron dengan arah pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang yang akan dilaksanakan pada tahun 2025.
2. Memantapkan kinerja Dinas Sosial agar lebih akuntabel dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam mencapai visi misi Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang.
3. Penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah untuk mendiskripsikan tentang program program prioritas pembangunan nasional dan daerah yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang.
4. Rencana Kerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja tahun sebelumnya sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2025 diuraikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS SOSIAL

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 4.1 Program dan Kegiatan

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi merupakan kegiatan untuk mengukur suatu aktivitas tertentu baik yang terkait perencanaan, pelaksanaan dan hasil dari pelaksanaan aktivitas. Pada konteks organisasi evaluasi adalah langkah penting dan strategis terutama guna mengukur tingkat pencapaian kinerja kelembagaan baik internal maupun eksternal, dimana hasil rumusan evaluasi pada kelanjutannya dapat menjadi pedoman bagi penentuan kebijakan, strategi dan program organisasi tersebut dimasa yang akan datang. Seiring dengan berkembangnya era reformasi, tuntutan akan reformasi birokrasi yang efektif, efisien dan akuntabel dalam rangka pencapaian tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih menjadi amanat yang harus dijalankan terutama oleh instansi pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah, dimana objektivitas pengukuran atas akuntabilitas tersebut dapat ditempuh melalui evaluasi sebagai instrumennya.

Sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, Dinas Sosial juga perlu untuk mengembangkan mekanisme evaluasi sebagai muatan objektif peningkatan kinerja kelembagaan sebagaimana yang diharapkan bersama, dimana hasilnya akan menentukan pengembangan kebijakan, strategi dan program pembangunan pada urusan sosial sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024 yang terkait program, kegiatan dan anggaran sampai dengan Triwulan II belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Catatan-catatan kinerja berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang sampai dengan tahun 2023 masih terus berupaya melakukan pembenahan internal terkait berbagai aspek baik sumber daya manusia, sistem dan prosedur termasuk data dan sarana prasarana penunjang kinerja kelembagaan, termasuk dalam penyusunan berbagai standardisasi pelayanan kinerja kelembagaan.
2. Pelaksanaan pengembangan bidang Sosial yang dilakukan baik secara langsung oleh Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang maupun yang dilaksanakan secara teknis oleh Pihak Ketiga, dimasa mendatang sangat membutuhkan tingkat sosialisasi yang terencana kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan lainnya sehingga dapat menumbuhkan kembangkan tingkat kesadaran masyarakat dan para pemangku kepentingan lainnya atas rasa saling memiliki terhadap pembangunan yang dilaksanakan sehingga dapat mendukung terciptanya pola hubungan harmonis dan sinergis antara pelaksana kegiatan dan masyarakat itu sendiri, yang pada akhirnya akan memberikan dampak bagi peningkatan kualitas hasil kegiatan dan efektifitas serta efisiensi.

Berikut Tabel Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024:

Tabel T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
Kabupaten Sidenreng Rappang

Dinas Sosial

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan	Indiaktor Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Renstra Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022 (Tahun 2021+2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renja Tahun Berjalan (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2024	
					Taget Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	NON URUSAN									
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100	100	100	100%	100	100	100%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	100	100	100	100%	100	100	100%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	12	6	6	100%	6	2	33%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	100	100	100	100%	100	100	25%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	300 Org/Bulan	24	300	300	100%	300	75	25%
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	24	12	12	100%	12	0	0%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	100	0	0	0%	0	0	0%
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	25 Dokumen	0	0	0	0%	0	0	0%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	100	100	100	100%	100	210	210%

	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	24	12	12	100%	12	3	25%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	210 Laporan	210	210	210	100%	210	8	4%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100	100	100	100%	100	0	0%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1500 Laporan	3000	1500	1500	100%	1500	0	0%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	24	12	12	100%	12	3	25%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	24	12	12	100%	12	0	0%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100	100	100	100%	100	0	0%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	26	13	13	100%	13	0	0%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yangDipelihara (Unit)	0	26	13	13	100%	0	0	0%
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL									
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Lembaga di Bidang Kesos yang Mendapatkan Peningkatan Kualitas Pelayanan	100 Persen	100	100	100	100%	95	0	0%
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PSKS Yang Tertangani	100 Persen	100	100	100	100%	95	0	0%
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Lembaga	12	6	6	100%	6	0	0%
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Jumlah Warga Negara Penyandang Disabilitas yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Diluar Panti	100 Persen	100	100	100	100%	100	0	0%
		Jumlah Anak Terlantar yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Diluar Panti	100 Persen	100	100	100	100%	100	0	0%

		Jumlah Warga Negara Lanjut Usia yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Diluar Panti	100 Persen	100	100	100	100%	100	0	0%
		Jumlah Warga Negara Gelandangan/Pengemis yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Diluar Panti	100 Persen	100	100	100	100%	100	0	0%
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial yang memperoleh rehabilitasi	100 Persen	100	100	100	100%	100	0	0%
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	22	15	5	33%	15	26	173%
	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Serta Gelandangan Pengemis Dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat kewenangan Kabupaten/Kota	2170 Orang	2184	2170	15	1%	2170	0	0%
	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	1	0	0	0%	10	0	0%
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Keluarga yang Mendapatkan Bantuan Sosial Bersyarat	98 Persen	100	100	99	99%	94	0	0%
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Data Masyarakat Miskin yang Diverifikasi dan Validasi serta Diberi Bantuan Sosial	98 Persen	100	100	99	99%	94	0	0%
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	12951 Keluarga	12951	12951	0	0%	12951	0	0%
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	55 Keluarga	0	5000	18	0%	55	0	0%
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial	100 Persen	100	100	100	100%	100	0	0%

	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Korban Bencana yang Memperoleh Perlindungan Sosial	100 Persen	100	100	100	100%	100	0	0%
	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengunsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	300 Orang	160	80	80	100%	300	25	8%
	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Korban Bencana yang Dievakuasi dengan Menggunakan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Lengkap	100 Persen	100	100	100	100%	100	0	0%
	Koordinasi, Sosialisasi, Dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	37 Orang	74	37	37	100%	37	0	0%
	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Tempat-Tempat Rintisan Kemerdekaan yang Tertangani	100 Persen	100	100	100	100%	100	0	0%
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	100 Persen	100	100	100	100%	100	0	0%
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	3 Makam	6	3	3	100%	3	0	0%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis pencapaian kinerja pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, yang dapat dijadikan pedoman bagi penentuan kebijakan, strategi dan program dinas di masa yang akan datang.

Analisis pencapaian kinerja pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai berikut:

Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial
Kabupaten Sidenreng Rappang

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7		9	10	12	12	13
1	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti		100%	100%	100%	100%	73.33%	100%	100%	100%	
2	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti		100%	100%	100%	100%	90,2%	100%	100%	100%	
3	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4	Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
5	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Beberapa isu-isu penting penyelenggaraan Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang, diantaranya:

- 1. Belum maksimalnya data real bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.
- 2. Masih adanya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang belum mendapat perhatian dari pemerintah.
- 3. Penyandang masalah kesejahteraan sosial kurang memiliki keterampilan.
- 4. Kesenjangan Kesejahteraan Sosial yang cukup tinggi antara masyarakat mampu dan tidak mampu.
- 5. Sarana dan prasarana lingkungan yang sangat minim.

Target Indikator SDGs

Target Kinerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Target Kinerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) Tahun 2024

Kode Indkator	Target/Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2022	Target Tahun 2024
TUJUAN 01 Tanpa Kemiskinan				
Tujuan SDGs 01 Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun				
Target 1.2 : Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.				
1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	%	5,11	4,52
1.3.1.(c)	Presentase Penyandang Disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas	KPM	2075	1717
1.3.1. (d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan Bantuan Tunai Bersyarat/Program Keluarga Harapan	KPM	10575	10575
TUJUAN : 10 Berkurangnya Kesenjangan				
Tujuan SDGs : Mengurangi Kesenjangan Intra - dan Antar Negara				
10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional				
10.1.1*	Koefisien Gini	%	0.354	0.343

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

RKPD adalah dokumen perencanaan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan. Adapun review terhadap perbandingan antara RKPD 2024 dengan rancangan awal usulan RKPD Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel T-C.31
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Kabupaten Sidenreng Rappang

Dinas Sosial

No	Rancangan Awal RKPD (Berdasarkan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025)					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	NON URUSAN					NON URUSAN					
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	Kab. Sidenreng Rappang	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	2,235,513,745	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	Kab. Sidenreng Rappang	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	2,257,868,882	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Sidenreng Rappang	Persentase Penyusunan Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	31,310,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Sidenreng Rappang	Persentase Penyusunan Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	31,623,100	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	31,310,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	31,623,100	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Sidenreng Rappang	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	1,904,345,855	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Sidenreng Rappang	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	1,923,389,314	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	300 Org/Bulan	1,900,810,855	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	300 Org/Bulan	1,919,818,964	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	3,535,000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	3,570,350	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Sidenreng Rappang	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	4,030,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Sidenreng Rappang	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	4,070,300	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	25 Dokumen	4,030,000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	25 Dokumen	4,070,300	

	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sidenreng Rappang	Persentase Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	100,505,000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sidenreng Rappang	Persentase Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	101,510,050	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	505,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	510,050	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	210 Laporan	100,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	210 Laporan	101,000,000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sidenreng Rappang	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	150,490,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sidenreng Rappang	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	151,994,900	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1500 Laporan	505,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1500 Laporan	510,050	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	28,280,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	28,562,800	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	121,705,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	122,922,050	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sidenreng Rappang	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	44,832,890	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sidenreng Rappang	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	45,281,219	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	44,832,890	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	45,281,219	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Kab. Sidenreng Rappang	Persentase Lembaga di Bidang Kesos yang Mendapatkan Peningkatan Kualitas Pelayanan	100 Persen	52,520,000	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Kab. Sidenreng Rappang	Persentase Lembaga di Bidang Kesos yang Mendapatkan Peningkatan Kualitas Pelayanan	100 Persen	53,045,200	

	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sidenreng Rappang	Persentase PSKS Yang Tertangani	100 Persen	52,520,000	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sidenreng Rappang	Persentase PSKS Yang Tertangani	100 Persen	53,045,200	
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Lembaga	52,520,000	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Lembaga	53,045,200	
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Warga Negara Penyandang Disabilitas yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Diluar Panti	100 Persen	1,212,000,000	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Warga Negara Penyandang Disabilitas yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Diluar Panti	100 Persen	1,224,120,000	
		Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Anak Terlantar yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Diluar Panti	100 Persen			Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Anak Terlantar yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Diluar Panti	100 Persen		
		Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Warga Negara Lanjut Usia yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Diluar Panti	100 Persen			Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Warga Negara Lanjut Usia yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Diluar Panti	100 Persen		
		Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Warga Negara Gelandangan/Pengemis yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Diluar Panti	100 Persen			Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Warga Negara Gelandangan/Pengemis yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Diluar Panti	100 Persen		
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial	Kab. Sidenreng Rappang	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial yang memperoleh rehabilitasi	100 Persen	1,212,000,000	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial	Kab. Sidenreng Rappang	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial yang memperoleh rehabilitasi	100 Persen	1,224,120,000	
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	505,000,000	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	510,050,000	

	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Serta Gelandangan Pengemis Dan Masyarakat	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat kewenangan Kabupaten/Kota	2170 Orang	700,000,000	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Serta Gelandangan Pengemis Dan Masyarakat	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat kewenangan Kabupaten/Kota	2170 Orang	707,000,000	
	Pemberian Layanan Kedaruratan	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	7,000,000	Pemberian Layanan Kedaruratan	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	7,070,000	
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Kab. Sidenreng Rappang	Persentase Keluarga yang Mendapatkan Bantuan Sosial Bersyarat	96 Persen	505,000,000	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Kab. Sidenreng Rappang	Persentase Keluarga yang Mendapatkan Bantuan Sosial Bersyarat	98 Persen	510,050,000	
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sidenreng Rappang	Persentase Data Masyarakat Miskin yang Diverifikasi dan Validasi serta Diberi Bantuan Sosial	96 Persen	505,000,000	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sidenreng Rappang	Persentase Data Masyarakat Miskin yang Diverifikasi dan Validasi serta Diberi Bantuan Sosial	98 Persen	510,050,000	
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	12951 Keluarga	202,000,000	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	12951 Keluarga	204,020,000	
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	55 Keluarga	303,000,000	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	55 Keluarga	306,030,000	
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Kab. Sidenreng Rappang	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial	100 Persen	234,320,000	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Kab. Sidenreng Rappang	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial	100 Persen	236,663,200	
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Kab. Sidenreng Rappang	Persentase Korban Bencana yang Memperoleh Perlindungan Sosial	100 Persen	202,000,000	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Kab. Sidenreng Rappang	Persentase Korban Bencana yang Memperoleh Perlindungan Sosial	100 Persen	204,020,000	

	Penyediaan Makanan	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengunsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	300 Orang	202,000,000	Penyediaan Makanan	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengunsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	300 Orang	204,020,000	
	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Sidenreng Rappang	Persentase Korban Bencana yang Dievakuasi dengan Menggunakan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Lengkap	100 Persen	32,320,000	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Sidenreng Rappang	Persentase Korban Bencana yang Dievakuasi dengan Menggunakan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Lengkap	100 Persen	32,643,200	
	Koordinasi, Sosialisasi, Dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	37 Orang	32,320,000	Koordinasi, Sosialisasi, Dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	37 Orang	32,643,200	
	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Kab. Sidenreng Rappang	Persentase Tempat-Tempat Rintisan Kemerdekaan yang Tertangani	100 Persen	20,200,000	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Kab. Sidenreng Rappang	Persentase Tempat-Tempat Rintisan Kemerdekaan yang Tertangani	100 Persen	20,402,000	
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kab. Sidenreng Rappang	Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	100 Persen	20,200,000	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kab. Sidenreng Rappang	Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	100 Persen	20,402,000	
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	3 Makam	20,200,000	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	3 Makam	20,402,000	
					4,259,553,745					4,302,149,282	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan masyarakat diperoleh melalui musyawarah pembangunan daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yang dihadiri oleh berbagai kelompok masyarakat, kepala desa, ormas dan lain sebagainya. Pada Renja Dinas Sosial tahun 2025 usulan program/ kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel T-C.32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Sidenreng Rappang
Dinas Sosial

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Lise	Persentase Data Masyarakat Miskin yang Diverifikasi dan Validasi serta Diberi Bantuan Sosial	1 Kegiatan	Pokir
2	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Wattang Sidenreng	Persentase Data Masyarakat Miskin yang Diverifikasi dan Validasi serta Diberi Bantuan Sosial	10 Kegiatan	Pokir
3	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Panca Rijang	Persentase Data Masyarakat Miskin yang Diverifikasi dan Validasi serta Diberi Bantuan Sosial	10 Kegiatan	Pokir
4	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kulo	Persentase Data Masyarakat Miskin yang Diverifikasi dan Validasi serta Diberi Bantuan Sosial	5 Unit	Musremban g
5	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Wattang Sidenreng	Persentase Data Masyarakat Miskin yang Diverifikasi dan Validasi serta Diberi Bantuan Sosial	100 Unit	Musremban g
6	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pitu Riase	Persentase Data Masyarakat Miskin yang Diverifikasi dan Validasi serta Diberi Bantuan Sosial	41 Unit	Musremban g
7	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Panca Lautang	Persentase Data Masyarakat Miskin yang Diverifikasi dan Validasi serta Diberi Bantuan Sosial	40 Unit	Musremban g
8	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Wattang Pulu	Persentase Data Masyarakat Miskin yang Diverifikasi dan Validasi serta Diberi Bantuan Sosial	5 Unit	Musremban g
9	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Tellu Limpoe	Persentase Data Masyarakat Miskin yang Diverifikasi dan Validasi serta Diberi Bantuan Sosial	21 Unit	Musremban g

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Yang dimaksud dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial ialah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Dimana diperlukan peran masyarakat yang seluas luasnya, baik perseorangan, keluarga, organisasi keagamaan, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, badan usaha, lembaga kesejahteraan sosial, maupun lembaga kesejahteraan sosial asing dalam hal ini (*stakeholder*) demi terselenggaranya kesejahteraan sosial yang terarah, terpadu dan berkelanjutan.

Sebab permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa ada warga negara yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan sosial dari negara dalam hal ini pemerintah setempat dikarenakan oleh beberapa faktor misalnya data penerima bantuan yang tidak akurat,. Dimana ketidakakuratan data selalu menjadi permasalahan klasik di setiap penyaluran bantuan sosial. Beberapa faktor diduga menjadi penyebab ketidakakuratan data, yaitu belum semua Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial terintegrasi dengan Nomor Induk 14 15 Kependudukan (NIK) yang dikelola Kementerian Dalam Negeri. Proses verifikasi dan validasi data juga masih lemah dan lambat. Sehingga masih ada warga negara yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial dan tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Tujuan merupakan sesuatu yang hendak dicapai dan dihasilkan pada jangka waktu tertentu. Sebagai penjabaran dari misi maka tujuan harus dapat mewujudkan suatu kondisi yang dicapai dimasa mendatang selanjutnya dijabarkan dalam sasaran pembangunan yang lebih operasional dan terukur. Tujuan rencana kerja Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kesejahteraan Sosial

Selanjutnya, sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang dan merupakan pejabaran konkrit dari tujuan yang telah ditetapkan. Adapun sasaran rencana kerja Dinas Sosial sebagai berikut:

1. Meningkatnya Upaya Penanggulangan Kemiskinan melalui Pemberdayaan Masyarakat dan Perlindungan Sosial
2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kinerja dan Keuangan

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam mewujudkan realisasi Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program kegiatan disertai indikator kinerja untuk tahun 2025.

4.1 Program dan Kegiatan

Adapun penjabaran program dan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2025 sebagai berikut:

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja
1	2	4
NON URUSAN		
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL		
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Lembaga di Bidang Kesos yang Mendapatkan Peningkatan Kualitas Pelayanan
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PSKS Yang Tertangani
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang

	Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota
3	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Jumlah Warga Negara Penyandang Disabilitas yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Diluar Panti
		Jumlah Anak Terlantar yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Diluar Panti
		Jumlah Warga Negara Lanjut Usia yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Diluar Panti
		Jumlah Warga Negara Gelandangan/Pengemis yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Diluar Panti
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial yang memperoleh rehabilitasi
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota
	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Serta Gelandangan Pengemis Dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat kewenangan Kabupaten/Kota
	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota
4	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Keluarga yang Mendapatkan Bantuan Sosial Bersyarat
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Data Masyarakat Miskin yang Diverifikasi dan Validasi serta Diberi Bantuan Sosial
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
5	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Korban Bencana yang Memperoleh Perlindungan Sosial
	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengunsian) Kewenangan Kabupaten/Kota
	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Korban Bencana yang Dievakuasi dengan Menggunakan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Lengkap
	Koordinasi, Sosialisasi, Dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota
6	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Tempat-Tempat Rintisan Kemerdekaan yang Tertangani
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota

Tabel T-C.33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Kabupaten Sidenreng Raappang

Dinas Sosial

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Urusan/Bidang	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2	3	4	5	6	7	8	9	10
NON URUSAN								
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sidenreng Rappang	100 Persen	2,567,208,600	APBD		100 Persen	2,257,868,883
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Sidenreng Rappang	100 Persen	70,520,000	APBD		100 Persen	31,623,100
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Sidenreng Rappang	6 Dokumen	70,520,000	APBD		6 Dokumen	31,623,100
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Sidenreng Rappang	100 Persen	1,945,670,600	APBD		100 Persen	1,923,389,314
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Sidenreng Rappang	300 Org/Bulan	1,935,670,600	APBD		300 Org/Bulan	1,919,818,964
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Sidenreng Rappang	12 Dokumen	10,000,000	APBD		12 Dokumen	3,570,350
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Sidenreng Rappang	100 Persen	-	APBD		100 Persen	5,070,300
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Sidenreng Rappang	25 Dokumen	-	APBD		25 Dokumen	5,070,300
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sidenreng Rappang	100 Persen	254,600,000	APBD		100 Persen	100,510,050
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Sidenreng Rappang	12 Paket	4,600,000	APBD		12 Paket	510,050

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sidenreng Rappang	210 Laporan	250,000,000	APBD		210 Laporan	100,000,000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sidenreng Rappang	100 Persen	196,418,000	APBD		100 Persen	151,994,900
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Sidenreng Rappang	1500 Laporan	1,000,000	APBD		1500 Laporan	510,050
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Sidenreng Rappang	12 Laporan	30,000,000	APBD		12 Laporan	28,562,800
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Sidenreng Rappang	12 Laporan	165,418,000	APBD		12 Laporan	122,922,050
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sidenreng Rappang	100 Persen	100,000,000	APBD		100 Persen	45,281,219
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Sidenreng Rappang	13 Unit	100,000,000	APBD		13 Unit	45,281,219
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL								
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Lembaga di Bidang Kesos yang Mendapatkan Peningkatan Kualitas Pelayanan	Kab. Sidenreng Rappang	100 Persen	150,000,000	APBD		100 Persen	53,045,200
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PSKS Yang Tertangani	Kab. Sidenreng Rappang	100 Persen	150,000,000	APBD		100 Persen	53,045,200
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Sidenreng Rappang	6 Lembaga	150,000,000	APBD		6 Lembaga	53,045,200
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Jumlah Warga Negara Penyandang Disabilitas yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Diluar Panti	Kab. Sidenreng Rappang	100 Persen	500,000,000	APBD		100 Persen	1,224,120,000
	Jumlah Anak Terlantar yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Diluar Panti	Kab. Sidenreng Rappang	100 Persen				100 Persen	
	Jumlah Warga Negara Lanjut Usia yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Diluar Panti	Kab. Sidenreng Rappang	100 Persen				100 Persen	
	Jumlah Warga Negara Gelandangan/Pengemis yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Diluar Panti	Kab. Sidenreng Rappang	100 Persen				100 Persen	
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial yang memperoleh rehabilitasi	Kab. Sidenreng Rappang	100 Persen	500,000,000	APBD		100 Persen	1,224,120,000

Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Sidenreng Rappang	15 Orang	350,000,000	APBD		15 Orang	510,050,000
Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Serta Gelandangan Pengemis Dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Sidenreng Rappang	2170 Orang	150,000,000	APBD		2170 Orang	700,000,000
Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Sidenreng Rappang	10 Orang	-	APBD		10 Orang	14,070,000
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Keluarga yang Mendapatkan Bantuan Sosial Bersyarat	Kab. Sidenreng Rappang	96 Persen	400,000,000	APBD		98 Persen	510,050,000
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Data Masyarakat Miskin yang Diverifikasi dan Validasi serta Diberi Bantuan Sosial	Kab. Sidenreng Rappang	96 Persen	400,000,000	APBD		98 Persen	510,050,000
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Kab. Sidenreng Rappang	12951 Keluarga	50,000,000	APBD		12951 Keluarga	204,020,000
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Sidenreng Rappang	55 Keluarga	350,000,000	APBD		55 Keluarga	306,030,000
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial	Kab. Sidenreng Rappang	100 Persen	305,000,000	APBD		100 Persen	236,663,200
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Korban Bencana yang Memperoleh Perlindungan Sosial	Kab. Sidenreng Rappang	100 Persen	300,000,000	APBD		100 Persen	204,020,000
Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengunsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Sidenreng Rappang	300 Orang	300,000,000	APBD		300 Orang	204,020,000
Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Korban Bencana yang Dievakuasi dengan Menggunakan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Lengkap	Kab. Sidenreng Rappang	100 Persen	5,000,000	APBD		100 Persen	32,643,200
Koordinasi, Sosialisasi, Dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Sidenreng Rappang	37 Orang	5,000,000	APBD		37 Orang	32,643,200
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Tempat-Tempat Rintisan Kemerdekaan yang Tertangani	Kab. Sidenreng Rappang	100 Persen	20,000,000	APBD		100 Persen	20,402,000
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	Kab. Sidenreng Rappang	100 Persen	20,000,000	APBD		100 Persen	20,402,000
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	Kab. Sidenreng Rappang	3 Makam	20,000,000	APBD		3 Makam	20,402,000
				3,942,208,600				4,302,149,283

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Tahun 2025 disusun sebagai dokumen perencanaan yang meliputi program dan kegiatan yang didalamnya menggambarkan capaian kinerja dan rencana kinerja anggaran. Pelaksanaan penyusunan serta penetapan program dan kegiatan pembangunan di dalam Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2025 bertujuan untuk meningkatkan Perencanaan Pembangunan yang berkualitas dan profesional di bidang sosial. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) 2024-2026 tersebut, yang dalam pelaksanaannya menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.

Sehubungan hal tersebut, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan yang ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Rencana Kerja Dinas Sosial tahun 2025, harus dilaksanakan secara konsisten, tertib dan terpadu melalui kerjasama dan koordinasi antar sekretariat dan bidang.
2. Dalam mempercepat perencanaan yang aspiratif upaya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan perlu terus ditingkatkan, mulai dari tahapan perencanaan sampai pelaksanaan pembangunan, sehingga diharapkan mereka mempunyai rasa memiliki dan bertanggungjawab terhadap hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan.
3. Penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2025 masih belum sempurna, sesuai dengan yang diamanatkan didalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, karena pemahaman tentang aturan dan tata cara penyusunan Renja masih sering belum sepahaman.
4. Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2025, harus menjadi dasar bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan tahun berikutnya.
5. Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 diharapkan menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pemerintah di bidang Sosial.

Pangkajene Sidenreng, 22 Juli 2024
Kepala Dinas Sosial,

WAHIDAH ALWI, SP., MM
Pangkat: Pembina Utama Muda
NIP.19710315 199803 2 003